

LAPORAN SINGKAT

KOMISI I DPR RI

KEMENTERIAN PERTAHANAN, KEMENTERIAN LUAR NEGERI, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, TENTARA NASIONAL INDONESIA, BADAN INTELIJEN NEGARA, DEWAN KETAHANAN NASIONAL, LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL, BADAN KEAMANAN LAUT RI, LPP TVRI, LPP RRI, PERUM LKBN ANTARA, DEWAN PERS, KOMISI PENYIARAN INDONESIA, KOMISI INFORMASI PUSAT, LEMBAGA SENSOR FILM (LSF), DAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA (BSSN)

Rapat ke : 26 (dua puluh enam)
Tahun Sidang : 2019-2020
Masa Persidangan : I
Jenis Rapat : Rapat Kerja (Raker) Komisi I DPR RI dengan Pemerintah (Menhan dan Menkumham)
Hari, Tanggal : Senin, 23 September 2019
Pukul : 15.00 WIB
Sifat Rapat : Terbuka
Pimpinan Rapat : Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari, Ketua Komisi I DPR RI
Sekretaris Rapat : Suprihartini, S.I.P. M.Si., Kabagset. Komisi I DPR RI
Tempat : Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II Lt. 1
Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270

Acara : 1. Laporan Panitia Kerja (Panja) Komisi I DPR RI mengenai RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) untuk Pertahanan Negara
2. Pendapat Akhir Mini Fraksi-Fraksi terhadap RUU tentang PSDN untuk Pertahanan Negara
3. Pendapat Akhir Pemerintah terhadap RUU tentang PSDN untuk Pertahanan Negara
4. Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang PSDN untuk Pertahanan Negara

Hadir : 1. ... orang dari 51 Anggota Komisi I DPR RI
2. a. Menhan, Ryamizard Ryacudu;
b. Menkumham, diwakili oleh Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I, Bunyamin, S.H., M.H.;
beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 Ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat membuka Rapat pada pukul 15.23 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah pada hari Senin, tanggal 23 September 2019, dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Ketua Komisi I DPR RI, Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari.

II. KESIMPULAN

1. Komisi I DPR RI dan Pemerintah dapat menerima dan menyetujui Laporan Panitia Kerja (Panja) Komisi I DPR RI mengenai RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) untuk Pertahanan Negara terkait dengan hasil pembahasan materi RUU tentang PSDN untuk Pertahanan Negara sebagaimana penugasan Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah (Menhan dan Menkumham) tanggal 22 Agustus 2019.
2. Setelah mendengarkan Pendapat Akhir Mini Fraksi-Fraksi dan Pendapat Akhir Pemerintah terhadap RUU tentang PSDN untuk Pertahanan Negara, Komisi I DPR RI dan Pemerintah sepakat menyetujui RUU tentang PSDN untuk Pertahanan Negara untuk dibawa ke Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi undang-undang.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 17.17 WIB.

Jakarta, 23 September 2019
KETUA RAPAT,

Dr. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI
A-111